



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.H. MUHTAROM, SE,MM,Ak,CA**

Jabatan : **INSPEKTUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

Pihak Kedua,  
  
  
**Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si**

Pihak Pertama,  
  
  
**Dr. H. MUHTAROM, SE, MM, Ak, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

SATUAN KERJA : INSPEKTORAT

DPPA TA-2021

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                    | SATUAN    | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                    | 4         | 5      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas SPIP                                                     | Capaian Maturitas SPIP                                               | Nilai     | 4.00   |
|    |                                                                                | Capaian Kapabilitas APIP                                             | level 1-5 | 3.00   |
| 2  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD | Nilai     | 85.00  |

**PENDAPATAN DAERAH**

**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

**JUMLAH PENDAPATAN Rp.**

**0,00**

**BELANJA**

| KODE                      | URUSAN / PROGRAM                                        | ANGGARAN                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.01                      | INSPEKTORAT DAERAH                                      | 70.364.066.518,00        |
| 6.01.01                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 62.222.696.268,00        |
| 6.01.02                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      | 6.549.159.250,00         |
| 6.01.03                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.592.211.000,00         |
| <b>JUMLAH BELANJA Rp.</b> |                                                         | <b>70.364.066.518,00</b> |

**GUBERNUR**

**INSPEKTUR**

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

Dr.H. MUHTAROM, SE,MM,Ak,CA  
NIP. 19630324 198402 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Pihak Pertama,**

**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**



# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | PROGRAM                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                        | SATUAN   | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5      |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH PROVINSI | Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah                                               | %        | 100    |
|    |                                                           | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD                                                                                     | Nilai    | 85     |
|    |                                                           | Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD               | %        | 100    |
|    |                                                           | Tersusunnya Dokumen Laporan keuangan sesuai kaidah laporan keuangan yang akuntabel                                                                       | Laporan  | 12     |
|    |                                                           | Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD                                         | %        | 100    |
|    |                                                           | Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur ( Diklat Fungsional Teknis Subtantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan ) | Kegiatan | 3      |
|    |                                                           | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah                                         | %        | 100    |
|    |                                                           | Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran                                                                                                                  | Kegiatan | 6      |
|    |                                                           | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah                                         | %        | 100    |
|    |                                                           | Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang memadai tepat waktu                                                                                             | Kegiatan | 5      |
|    |                                                           | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung                                                                                                   | %        | 100    |



|                     |                                                                                                          |                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.01.01.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 1.451.394.100,00        |
| <b>6.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                | <b>6.549.159.250,00</b> |
| <b>6.01.02.1.01</b> | <b>Pelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                  | <b>5.676.153.250,00</b> |
| 6.01.02.1.01.01     | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 305.300.000,00          |
| 6.01.02.1.01.02     | Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah                                                                    | 4.092.381.250,00        |
| 6.01.02.1.01.03     | Reviu Laporan Kinerja                                                                                    | 280.650.000,00          |
| 6.01.02.1.01.04     | Reviu Laporan Keuangan                                                                                   | 570.123.000,00          |
| 6.01.02.1.01.05     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 427.699.000,00          |
| <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                                 | <b>873.006.000,00</b>   |
| 6.01.02.1.02.01     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                           | 138.320.000,00          |
| 6.01.02.1.02.02     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                        | 734.686.000,00          |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                           | <b>1.592.211.000,00</b> |
| <b>6.01.03.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>                         | <b>512.590.000,00</b>   |
| 6.01.03.1.01.01     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan                                                          | 512.590.000,00          |
| <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                        | <b>1.079.621.000,00</b> |
| 6.01.03.1.02.01     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 662.595.000,00          |
| 6.01.03.1.02.02     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                   | 45.050.000,00           |
| 6.01.03.1.02.03     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                | 358.276.000,00          |
| 6.01.03.1.02.04     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                              | 13.700.000,00           |

**Inspektur Daerah  
Provinsi Banten**



**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Sekretaris**



**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu I**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Pihak Pertama,**

**Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19690926 199003 1 003**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | PROGRAM                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                            | SATUAN | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                            | 4      | 5      |
| 1  | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                            | Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah          | %      | 20     |
|    |                                                                     | Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah | %      | 12     |
|    |                                                                     | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          | %      | 25     |
|    |                                                                     | Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten                           | %      | 14     |
|    |                                                                     | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI                                   | %      | 13     |
|    |                                                                     | Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah        | %      | 46     |
| 2  | PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN DAN<br>ASISTENSI | Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                               | %      | 19     |

### PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

**JUMLAH PENDAPATAN : Rp. 0,00**

### BELANJA

| KODE            | URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN                                                                               | ANGGARAN         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.01            | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                       | 787.240.000,00   |
| 6.01.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                       | 5.676.153.250,00 |
| 6.01.02.1.01    | Pelenggaraan Pengawasan Internal                                                                         | 550.420.000,00   |
| 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 105,000,000,00   |
| 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah                                                                    | 104,750,000,00   |
| 6.01.02.1.01.03 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                    | 91,250,000,00    |
| 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                   | 249,420,000,00   |
| 6.01.02.1.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -                |

|                     |                                                                                           |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                  | <b>55.870.000,00</b>  |
| 6.01.02.1.02.01     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            | -                     |
| 6.01.02.1.02.02     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                         | 55.870.000,00         |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                            | <b>180.950.000,00</b> |
| <b>6.01.03.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>          | <b>-</b>              |
| 6.01.03.1.01.01     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan                                           | -                     |
| <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                         | <b>180.950.000,00</b> |
| 6.01.03.1.02.01     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 180.950.000,00        |
| 6.01.03.1.02.02     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | -                     |
| 6.01.03.1.02.03     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -                     |
| 6.01.03.1.02.04     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | -                     |

**Inspektur Daerah  
Provinsi Banten**



**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Inspektur Pembantu I**



**Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19690926 199003 1 003**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Khairudin, ST, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu II**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Pihak Pertama,**

**Khairudin, ST, M.Si**  
**NIP. 19690412 200112 1 005**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | PROGRAM                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                            | SATUAN | TARGET |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                        | 3                                                                                            | 4      | 5      |
| 1  | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN | Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah | %      | 32     |
|    |                                          | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          | %      | 25     |
|    |                                          | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI                                   | %      | 38     |

### PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

**JUMLAH PENDAPATAN : Rp. 0,00**

### BELANJA

| KODE            | URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN                                                                               | ANGGARAN         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.01            | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                       | 1.034.551.750,00 |
| 6.01.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                                                                    | 853.601.750,00   |
| 6.01.02.1.01    | Pelenggaraan Pengawasan Internal                                                                         | 67.0573.750,00   |
| 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 600.000,00       |
| 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah                                                                    | 530.005.750,00   |
| 6.01.02.1.01.03 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                    | 32.700.000,00    |
| 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                   | 107.268.000,00   |
| 6.01.02.1.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -                |

|                     |                                                                                           |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP                           |                       |
| <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                  | <b>183.028.000,00</b> |
| 6.01.02.1.02.01     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            | -                     |
| 6.01.02.1.02.02     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                         | 183.028.000,00        |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,<br/>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                        | <b>180.950.000,00</b> |
| <b>6.01.03.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>           | -                     |
| 6.01.03.1.01.01     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan                                           | -                     |
| <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                         | -                     |
| 6.01.03.1.02.01     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | -                     |
| 6.01.03.1.02.02     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | -                     |
| 6.01.03.1.02.03     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -                     |
| 6.01.03.1.02.04     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | -                     |

**Inspektur Daerah  
Provinsi Banten**



**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Inspektur Pembantu II**



**Khairudin, ST, M.Si**  
**NIP. 19690412 200112 1 005**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Endad Haryanto, SE, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu III**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Pihak Pertama,**

**Endad Haryanto, SE, M.Si**  
**NIP. 19730403 200112 1 003**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                            | SATUAN | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                            | 4      | 5      |
| 1  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      | Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah | %      | 40     |
|    |                                                         | Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                          | %      | 50     |
| 2  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                               | %      | 6      |

### PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

**JUMLAH PENDAPATAN : Rp. 0,00**

### BELANJA

| KODE            | URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN                                                                               | ANGGARAN       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6.01            | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                       | 428.295.000,00 |
| 6.01.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                       | 35.8945.000,00 |
| 6.01.02.1.01    | Pelenggaraan Pengawasan Internal                                                                         | 67.0573.750,00 |
| 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 0              |
| 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah                                                                    | 342.845.000,00 |
| 6.01.02.1.01.03 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                    | 0              |
| 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                   | 16.100.000,00  |
| 6.01.02.1.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -              |

|                     |                                                                                           |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                     | Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP                           |                      |
| <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                  | <b>69.350.000,00</b> |
| 6.01.02.1.02.01     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            | -                    |
| 6.01.02.1.02.02     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                         | 69.350.000,00        |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,<br/>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                        | -                    |
| <b>6.01.03.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>          | -                    |
| 6.01.03.1.01.01     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan                                           | -                    |
| <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                         | -                    |
| 6.01.03.1.02.01     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | -                    |
| 6.01.03.1.02.02     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | -                    |
| 6.01.03.1.02.03     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -                    |
| 6.01.03.1.02.04     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | -                    |

**Inspektur Daerah  
Provinsi Banten**

**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Inspektur Pembantu III**

**Endad Haryanto, SE, M.Si**  
**NIP. 19730403 200112 1 003**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si**

Jabatan : **Inspektur Pembantu IV**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Muhtarom, AK, CA**

Jabatan : **Inspektur Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Pihak Pertama,**

**Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si**  
**NIP. 19660226 199403 1 001**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | PROGRAM                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                   | SATUAN | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                   | 4      | 5      |
| 2  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      | Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah | %      | 80     |
|    |                                                         | Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten                  | %      | 86     |
|    |                                                         | Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                  | %      | 42     |
| 3  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan                      | %      | 31     |

**PENDAPATAN DAERAH**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

**JUMLAH PENDAPATAN : Rp. 0,00**

**BELANJA**

| KODE            | URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN                  | ANGGARAN       |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|
| 6.01            | INSPEKTORAT DAERAH                          | 871.587.000,00 |
| 6.01.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN          | 468.060.000,00 |
| 6.01.02.1.01    | Pelenggaraan Pengawasan Internal            | 106.200.000,00 |
| 6.01.02.1.01.01 | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah         | 0              |
| 6.01.02.1.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah       | 0              |
| 6.01.02.1.01.03 | Reviu Laporan Kinerja                       | 106.200.000,00 |
| 6.01.02.1.01.04 | Reviu Laporan Keuangan                      | 0              |
| 6.01.02.1.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil | -              |

|                     |                                                                                           |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP                           |                       |
| <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                  | <b>361.860.000,00</b> |
| 6.01.02.1.02.01     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            | -                     |
| 6.01.02.1.02.02     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                         | 361.860.000,00        |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,<br/>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                        | <b>403.527.000,00</b> |
| <b>6.01.03.1.01</b> | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br/>Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>       | <b>-</b>              |
| 6.01.03.1.01.01     | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan                                           | -                     |
| <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                         | <b>403.527.000,00</b> |
| 6.01.03.1.02.01     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 294.677.000,00        |
| 6.01.03.1.02.02     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | 44.050.000,00         |
| 6.01.03.1.02.03     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 64.800.000,00         |
| 6.01.03.1.02.04     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | -                     |

**Inspektur Daerah  
Provinsi Banten**



**Dr. H. Muhtarom, AK, CA**  
**NIP. 19630324 198402 1 001**

**Inspektur Pembantu IV**



**Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si**  
**NIP. 19660226 199403 1 001**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Husen Fadilah, SE.,M.Ak**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**

**Pihak Pertama,**

**Husen Fadilah, SE.,M.Ak**  
**NIP. 19740607 200112 1 003**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                   | SATUAN                         | TARGET      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                                                   | 4                              | 5           |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | Dokumen                        | 2           |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                        | 4           |
| 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Dokumen                        | 4           |
| 4  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                       | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                       | Kegiatan<br>Laporan<br>Dokumen | 6<br>2<br>4 |

### PENDAPATAN DAERAH

### PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

### JUMLAH PENDAPATAN :

Rp.

0,00

### BELANJA

| KODE                | URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/                                                              | ANGGARAN              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>6</b>            | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                           | <b>594.175.000,00</b> |
| <b>6.01</b>         | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                             | <b>594.175.000,00</b> |
| <b>6.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>81.585.000,00</b>  |
| <b>6.01.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>81.585.000,00</b>  |
| 6.01.01.1.01.01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 52.085.000,00         |
| 6.01.01.1.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.100.000,00          |
| 6.01.01.1.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 23.400.000,00         |

|              |                                                                              |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6.01.03      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   | 512.590.000,00 |
| 6.01.03.1.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan<br>dan Fasilitasi Pengawasan | 512.590.000,00 |
|              | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                              | 512.590.000,00 |

Sekretaris  
Inspektorat Daerah  
Provinsi Banten



Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si  
NIP. 19680713 198903 2 007

Kepala Sub Bagian Perencanaan  
Inspektorat Daerah  
Provinsi Banten



Husen Fadilah, SE., M.Ak  
NIP. 19740607 200112 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Desta Munggara, ST**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**

Jabatan : **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**

**Pihak Pertama,**

**Desta Munggara, ST**  
**NIP. 19721210 200701 1 008**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN                                       | TARGET            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                            | 5                 |
| 1  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                  | Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                          | Bulan                                        | 12                |
| 2  | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | Terlaksananya Audit Kinerja pada Program dan Kegiatan Provinsi Banten (Irban I)<br>Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemprov dan Kabupaten/Kota TA. 2021 (Irban IV)                                                                   | Kegiatan<br>Kegiatan                         | 1<br>4            |
| 3  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Terlaksananya Audit Ketaatan, MCP dan Pendampingan BPK<br>Terlaksananya Audit Operasional Irban I<br>Terlaksananya Audit Operasional, Probity dan Monev BMD (Irban 2)<br>Terlaksananya Audit, Reviu, Probity dan Evaluasi Satgas AKD | Kegiatan<br>Kegiatan<br>Kegiatan<br>Kegiatan | 10<br>3<br>8<br>4 |
| 4  | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Resiko OPD Provinsi Banten<br>Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan dan Kinerja (Irban IV)                                                                                                   | Kegiatan<br>Kegiatan                         | 1<br>6            |
| 5  | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Terlaksananya Reviu DAK, LKPD Prov, Monev LKPD 2021 (Irban II)<br>Terlaksananya Reviu dan Monev Irban III<br>Terlaksananya Reviu RKA 2022, RKAP 2021, LKPD (Irban I)                                                                 | Kegiatan<br>Kegiatan<br>Kegiatan             | 3<br>6<br>3       |
| 6  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Monitoring & TL IRBAN II<br>Terlaksananya Monitoring & TL IRBAN III<br>Terlaksananya Pemantauan dan Tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT                                                   | Kegiatan<br>Kegiatan<br>Kegiatan             | 3<br>1<br>4       |

|    |                                                                                            |                                                                            |          |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| 7  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                             | Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah             | Kegiatan | 1 |
| 8  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                          | Terlaksananya Audit Tujuan tertentu (Irban I)                              | Kegiatan | 1 |
| 9  | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                        | Terlaksananya Kegiatan Satgas AKD                                          | Kegiatan | 3 |
|    |                                                                                            | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SPIP (Irban III)              | Kegiatan | 2 |
|    |                                                                                            | Terlaksananya Monev dan Workshop PPUPD (Irban IV)                          | Kegiatan | 9 |
|    |                                                                                            | Terlaksananya Monev LK, Kas Opname, Consulting dan Evaluasi SPIP (Irban I) | Kegiatan | 4 |
| 10 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                      | Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020                      | Kegiatan | 1 |
| 11 | Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya HAKI 2021                                                    | Kegiatan | 1 |
|    |                                                                                            | Terlaksananya Kegiatan Tim Saber Pungli Prov Banten                        | Kegiatan | 1 |
|    |                                                                                            | Terlaksananya Kegiatan UPG Prov Banten                                     | Kegiatan | 1 |
|    |                                                                                            | Terlaksananya Rencana Aksi PPK Daerah Prov Banten                          | Kegiatan | 1 |
| 12 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                | Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten                   | Kegiatan | 1 |

**PENDAPATAN DAERAH**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
**JUMLAH PENDAPATAN :**

**Rp.**

**0,00**

**BELANJA**

| KODE                | URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN                                             | ANGGARAN                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>6.01</b>         | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                              | <b>629.672.000,00</b>   |
| <b>6.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>             | <b>629.672.000,00</b>   |
| <b>6.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>629.672.000,00</b>   |
| 6.01.01.1.06.11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 629.672.000,00          |
| <b>6.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                              | <b>6.549.159.250,00</b> |
| <b>6.01.02.1.01</b> | <b>Pelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                | <b>5.676.153.250,00</b> |
| 6.01.02.1.01.01     | Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah                                    | 305.300.000,00          |

|                     |                                                                                                          |                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.01.02.1.01.02     | Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah                                                                    | 4.092.381.250,00        |
| 6.01.02.1.01.03     | Reviu Laporan Kinerja                                                                                    | 280.650.000,00          |
| 6.01.02.1.01.04     | Reviu Laporan Keuangan                                                                                   | 570.123.000,00          |
| 6.01.02.1.01.05     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BBPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 427.699.000,00          |
| <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                                 | <b>873.006.000,00</b>   |
| 6.01.02.1.02.01     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                           | 138.320.000,00          |
| 6.01.02.1.02.02     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                        | 734.686.000,00          |
| <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                           | <b>1.079.621.000,00</b> |
| <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                        | <b>1.079.621.000,00</b> |
| 6.01.03.1.02.01     | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 662.595.000,00          |
| 6.01.03.1.02.02     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                   | 45.050.000,00           |
| 6.01.03.1.02.03     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                | 358.276.000,00          |
| 6.01.02.1.01.04     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                              | 13.700.000,00           |

**Sekretaris**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Banten**



**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**

**Kepala Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Banten**



**Desta Munggara, ST**  
**NIP. 19721210 200701 1 008**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Oktober 2021

**Pihak Kedua,**

**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**

**Pihak Pertama,**

**Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si**  
**NIP. 19750505 200112 2 003**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

| NO | SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                       | SATUAN   | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                       | 4        | 5      |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | Bulan    | 14     |
| 2  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Tersusunnya Dokumen Laporan keuangan                                                                                                                    | Laporan  | 12     |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan                             | Tersusunnya Dokumen Laporan keuangan                                                                                                                    | Laporan  | 12     |
|    |                                                                        | Tersusunnya Laporan Dokumen Perpajakan                                                                                                                  | Laporan  | 12     |
| 4  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Terlaksananya Peningkatan kompetensi Aparatur (Diklat Fungsional Teknis Substantif, sertifikasi jabatan fungsional dan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan) | Kegiatan | 3      |
| 5  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                       | Kegiatan | 1      |
| 6  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                              | Kegiatan | 2      |
| 7  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                              | Kegiatan | 2      |
| 8  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah                                                                                 | Bulan    | 12     |
| 9  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                         | Bulan    | 12     |
| 10 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | Kegiatan | 1      |
| 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana kantor                                                                                                     | Kegiatan | 3      |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                   | Bulan    | 12     |

|    |                                                                                                                    |                                                                                          |          |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor                                           | Bulan    | 12  |
| 14 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Unit     | 6   |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional                                               | Unit     | 23  |
| 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Komputer) | Unit     | 146 |
| 17 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor                                        | Kegiatan | 4   |

#### PENDAPATAN DAERAH

#### PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

JUMLAH PENDAPATAN :

Rp.

0,00

#### BELANJA

| KODE                | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN                                                   | ANGGARAN                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>6.01</b>         | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                     | <b>61.692.736.268,00</b> |
| <b>6.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                  | <b>61.692.736.268,00</b> |
| <b>6.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>55.336.902.768,00</b> |
| 6.01.01.1.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 54.957.582.768,00        |
| 6.01.01.1.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 335.850.000,00           |
| 6.01.01.1.02.03     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 43.470.000,00            |
| <b>6.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>674.500.000,00</b>    |
| 6.01.01.1.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 52.000.000,00            |
| 6.01.01.1.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 622.500.000,00           |
| <b>6.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>1.047.187.400,00</b>  |
| 6.01.01.1.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 98.000.000,00            |

|                     |                                                                                                                    |                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.01.01.1.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 431.068.400,00          |
| 6.01.01.1.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 285.195.000,00          |
| 6.01.01.1.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 232.924.000,00          |
| <b>6.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>537.989.000,00</b>   |
| 6.01.01.1.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 37.989.000,00           |
| 6.01.01.1.07.10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 500.000.000,00          |
| <b>6.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>2.463.466.000,00</b> |
| 6.01.01.1.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 641.462.400,00          |
| 6.01.01.1.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.822.003.600,00        |
| <b>6.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.451.394.100,00</b> |
| 6.01.01.1.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 187.410.000,00          |
| 6.01.01.1.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 384.838.000             |
| 6.01.01.1.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 131.770.000             |
| 6.01.01.1.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 747.376.100             |

**Sekretaris**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Banten**



**Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si**  
**NIP. 19680713 198903 2 007**

**Kepala Sub Bagian Administrasi Umum**  
**Dan Keuangan Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Banten**



**Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si**  
**NIP. 19750505 200112 2 003**